

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA USAHA ANGKUTAN UMUM DI TERMINAL TIPE-C GUNTUR GARUT

Erna Rustiana

Universitas Garut

erna.rustiana@gmail.com

Ieke Sartika Iriany

Universitas Garut

ieke_sartika@fisip.uniga.ac.id

Ardi Pardiansyah Nugraha

Universitas Garut

ardi_pardiansyah@fisip.uniga.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian kebijakan retribusi jasa usaha angkutan umum di Terminal Tipe-C Guntur Garut, serta mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui proses observasi, studi dokumentasi, dan wawancara terhadap 8 informan dengan menggunakan teknik purposive. Data kemudian dianalisis mulai dari tahap mereduksi data, menyajikan data, hingga menarik kesimpulan. Edward III berpandangan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh empat faktor yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Semua faktor tersebut bekerja dan mempengaruhi tingkat efektivitas implementasi kebijakan retribusi jasa usaha angkutan umum, baik secara langsung, tidak langsung dan berinteraksi secara simultan. Komunikasi dan sumberdaya menjadi faktor yang berpengaruh dalam menghambat implementasi kebijakan retribusi jasa usaha angkutan umum ini. Maka dari itu peneliti memberikan saran untuk melakukan komunikasi ulang secara intensif dan memanfaatkan media komunikasi, memberikan pelatihan yang spesifik bagi SDM serta membenahi fasilitas yang ada guna mengoptimalkan kembali fungsi Terminal Tipe-C Guntur Garut.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Retribusi Jasa, Usaha Angkutan Umum, Terminal.

Abstract

The purpose of this study is to find out how the implementation of the public transportation service retribution policy at the Guntur Garut Type-C Terminal, as well as to find out the factors that become obstacles in implementing the policy. With a descriptive qualitative approach, through the process of observation, documentation study, and interviews with 8 informants using purposive techniques. The data is then analyzed starting from the stage of reducing the data, presenting the data, to drawing conclusions. Edward III is of the view that the success or failure of policy implementation can be influenced by four factors, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. All of these factors work and affect the level of effectiveness of the implementation of the retribution policy for public transportation services, either directly, indirectly and interacting simultaneously. Communication and resources are influencing factors in hindering the implementation of this public transport service retribution policy. Therefore, the researcher provides suggestions for intensive re-communication, providing specific training for HR and improving existing facilities in order to optimize the function of the Guntur Garut Type-C Terminal.

Keywords: Policy Implementation, Service Charges, Public Transport Businesses, Terminals.

PENDAHULUAN

Retribusi daerah merupakan pungutan wilayah menjadi pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara spesifik disediakan dan/atau diberikan bagi kepentingan orang atau badan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut salah satu jenis retribusi yaitu Retribusi Jasa Usaha, dimana jasa (pelayanan) yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang pada dasarnya bisa juga disediakan oleh pihak swasta.¹

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut selaku daerah otonom dituntut agar dapat mengatur serta mengurus pemerintahannya sendiri, sehingga segala sesuatunya tidak bergantung pada pemerintah pusat. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dalam penyelenggaraan terminal berkaitan dengan Retribusi Jasa Usaha Angkutan Umum, Pemerintah Kabupaten Garut mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016.²

Pengamatan awal yang telah peneliti lakukan ke lapangan, dalam pelaksanaan kebijakan retribusi jasa usaha Angkutan Umum di Terminal Tipe-C Guntur Garut ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya: 1) Minimnya komunikasi yang dilakukan oleh instansi terkait kebijakan retribusi jasa usaha angkutan umum kepada masyarakat khususnya yang menjadi subjek retribusi baik orang pribadi atau badan selaku pengguna jasa pelayanan fasilitas terminal. Dimana tidak ada pemanfaatan media komunikasi lain sejauh ini, hanya tertera pada karcis retribusi;³ 2) Pengelolaan sumberdaya yang tidak berfungsi, rendahnya pemeliharaan sumberdaya peralatan yang menjadi sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan yang ada di Terminal Tipe-C Guntur Garut yang terbengkalai sudah menjadi rahasia umum; 3) Penertiban yang harusnya dilakukan terhadap angkutan umum yang melanggar belum optimal, baik sanksi berupa teguran ataupun penindakan langsung di lapangan seperti sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan terkait retribusi jasa usaha;⁴ 4) Terdapat trayek transportasi umum yang tidak memasuki area Terminal Tipe-C Guntur Garut yang mengakibatkan tidak terpungutnya retribusi pada angkutan tersebut.

¹ Ramadhan, Puja Rizqy. "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi* 5.1 (2019): 81-87.

² Tevapitak, K., dan AHJ Bert Helmsing. "The Interaction between Local Governments and Stakeholders in Environmental Management: The Case of Water Pollution by SMEs in Thailand." *Journal of Environmental Management* 247 (2019): 840-848.

³ Zhang, Junyi. "Transport Policymaking that Accounts for COVID-19 and Future Public Health Threats: A PASS Approach." *Transport policy* 99 (2020): 405-418.

⁴ Widodo, Hananto. "Penegakan Hukum terhadap Pedagang Asongan Berkaitan dengan Larangan Menjual Barang di Dalam Angkutan Umum Jenis Bus di Terminal Tambak Osowilangun Surabaya." *Novum: Jurnal Hukum* 7.4 (2020).

Penelitian terkait retribusi terminal telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun dengan fokus dan objek yang berbeda. Peneliti mencoba memetakan hasil penelitian ini dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu untuk menjadi acuan serta menghindari kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Terdapat perbedaan dan juga persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini.⁵ Penelitian terdahulu lebih berfokus pada objek penelitian secara umum yakni retribusi terminal, sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada objek penelitian secara khusus yakni pada retribusi angkutan umum. Kemudian memiliki subjek yang sama yaitu terminal namun dengan lokasi yang berbeda dan teori yang digunakan juga berbeda, sehingga hasil dari penelitian ini jelas akan berbeda dengan penelitian terdahulu.⁶

Permasalahan yang muncul dalam pemungutan retribusi angkutan umum tersebut menyebabkan realisasi pendapatan tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Mengingat bahwa retribusi jasa usaha pada sektor angkutan umum juga menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup berpotensi bagi PAD di Kabupaten Garut. Hal itulah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji secara komprehensif dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Angkutan Umum di Terminal Tipe-C Guntur Garut". Dengan tujuan untuk mengetahui pengimplementasian Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Angkutan Umum di Terminal Tipe-C Guntur Garut.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan

Edward menyatakan bahwa ada empat variabel penting dalam implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, kecenderungan atau perilaku, dan struktur birokrasi. Menurut Edward, konteks kecenderungan dan perilaku berarti kemauan, keinginan, dan kecenderungan pembuat kebijakan untuk mengimplementasikannya secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat terwujud.⁷ Jika suatu kebijakan ingin diimplementasikan secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi juga memiliki niat untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.⁸

⁵ Miraj, Perdana, dkk. "Research Trend of Dry Port Studies: A Two-Decade Systematic Review." *Maritime Policy & Management* 48.4 (2021): 563-582.

⁶ Mańkowska, Marta, dkk. "Seaports during the COVID-19 Pandemic: The Terminal Operators' Tactical Responses to Disruptions in Maritime Supply Chains." *Energies* 14.14 (2021): 4339.

⁷ Sari, Diana, dan Mulyono Yalia. "Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi untuk Pengembangan Kepariwisata di Kota Cirebon." *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)* 20.1 (2019): 13-28.

⁸ Dalimunthe, Yowanda Pasyah, dan Susilawati Susilawati. "Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Medan Menggunakan Teori Edward III." *FLORONA: Jurnal Ilmiah Kesehatan* 1.2 (2022): 59-64.

Fragmentasi adalah tersebarnya tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga diperlukan koordinasi dalam pelaksanaannya.⁹ Edward mengatakan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah atau tersebar) dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kegagalan komunikasi, karena kemungkinan terjadinya distorsi informasi akan sangat besar. Semakin terdistorsi suatu informasi, semakin intensif koordinasi yang dibutuhkan.¹⁰

Meskipun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana kebijakan mengetahui apa dan bagaimana melakukannya, serta memiliki keinginan untuk melakukannya, Edward menyatakan bahwa implementasi kebijakan mungkin masih belum efektif karena struktur birokrasi yang tidak efisien. Menurut Edward struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian wewenang, serta hubungan antar unit organisasi dan sebagainya.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian Edward III, diketahui bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat mungkin menjadi penghambat implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara kerja baru atau jenis personel baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Dengan demikian, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar kemungkinan SOP menghambat implementasi kebijakan.¹²

B. Biaya Retribusi

Retribusi daerah merupakan pembayaran tertentu atas jasa atau perizinan yang disediakan atau diberikan oleh perseorangan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Menurut Latief, retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan atau diberikan oleh perseorangan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹³ Pelayanan tersebut dapat dikatakan bersifat langsung. Salah satu contohnya adalah retribusi jasa angkutan umum yang dipungut oleh pemerintah. Objek retribusi adalah retribusi atas pelayanan yang diberikan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua dapat dipungut Retribusi oleh pemerintah daerah, tetapi hanya jenis-jenis pelayanan

⁹ Pozoukidou, Georgia, dan Zoi Chatziyiannaki. "15-Minute City: Decomposing the New Urban Planning Eutopia." *Sustainability* 13.2 (2021): 928.

¹⁰ Nurlailah, Nurlailah. "Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kab. Ogan Komering Ulu." *Jurnal dinamika* 1.2 (2021): 59-68.

¹¹ Watopa, Elsy Henni, Alfitri Alfitri, dan Andrias Lionardo. "Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kampung Tobati di Kota Jayapura Provinsi Papua." *SEIKO: Journal of Management & Business* 4.3 (2022): 32-41.

¹² Mubarok, Syahrul, dkk. "Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee s Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework." *JPAS (Journal of Public Administration Studies)* 5.1 (2020): 33-38.

¹³ Nurfatriani, Fitri, dkk. "Oil Palm Economic Benefit Distribution to Regions for Environmental Sustainability: Indonesia's Revenue-Sharing Scheme." *Land* 11.9 (2022): 1452.

tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi sebagai objek yang layak dipungut Retribusi.¹⁴

Retribusi biasanya bermanfaat bagi pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat diketahui sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Menurut Mardiasmo Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya.¹⁶

Retribusi lokal untuk daerah biasanya terbagi ke dalam beberapa jenis. Retribusi Pelayanan Publik adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh perseorangan atau dinas.¹⁷ Retribusi jasa usaha adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa khusus usaha yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan swasta atau dinas. Retribusi Perizinan Khusus adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang secara khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau departemen.¹⁸

C. Angkutan Umum

Angkutan umum adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan umum dengan dipungut biaya. Dalam perencanaan transportasi, diperlukan peramalan perilaku perjalanan secara akurat antara atribut sistem transportasi dan keputusan individu untuk melakukan perjalanan.¹⁹ Berkembangnya berbagai bidang di dalam masyarakat, seperti ekonomi

¹⁴ Roemer, Kelli F., dan Julia H. Haggerty. "The Energy Transition as Fiscal Rupture: Public Services and Resilience Pathways in a Coal Company Town." *Energy Research & Social Science* 91 (2022): 102752.

¹⁵ Lubis, Rahmat, dan Utary Maharany Barus. "BPHTB Management in Increasing Genuine Income Deli Serdang District." *East Asian Journal of Multidisciplinary Research* 1.10 (2022): 2291-2300.

¹⁶ Feldman, Maryann, Frederick Guy, dan Simona Iammarino. "Regional Income Disparities, Monopoly dan Finance." *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society* 14.1 (2021): 25-49.

¹⁷ Kristiana, T., dan R. I. Poetri. "Implementation of Local Tax Service Policies at the Regional Tax and Retribution Management Agency Office of Palangka Raya City." *Jurnal Terapan Manajemen Dan Bisnis* 5.2 (2019): 61-69.

¹⁸ Roestamy, Martin, dkk. "A Review of the Reliability of Land Bank Institution in Indonesia for Effective Land Management of Public Interest." *Land Use Policy* 120 (2022): 106275.

¹⁹ Li, Zao, dkk. "Analysis of the Elderly's Preferences for Choosing Medical Service Facilities from the Perspective of Accessibility: A Case Study of Tertiary General Hospitals in Hefei, China." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19.15 (2022): 9432.

menyebabkan perlu adanya perkembangan di dalam bidang angkutan umum agar dapat menyeimbangkan perkembangan ini. Hal ini dikarenakan banyak sekali bidang yang sangat membutuhkan angkutan umum. Kegiatan-kegiatan seperti perdagangan, pekerjaan, rekreasi dan berbagai kegiatan lainnya sangat dipengaruhi oleh kondisi angkutan umum yang ada.²⁰

Empat tujuan dasar pengoperasian angkutan umum meliputi:

- a) Menyediakan akses ke pekerjaan, pendidikan, ritel, kesehatan, fasilitas rekreasi, dll.
- b) Memastikan kemungkinan bepergian bagi semua penduduk yang tidak dapat atau tidak ingin menggunakan mobil pribadi;
- c) Menyediakan perjalanan yang dibandingkan dengan penggunaan mobil pribadi tidak efektif karena alasan ekonomi, waktu atau ekologis;
- d) Menjadi alternatif sebenarnya dari mobil pribadi (Pozoukidou & Chatziyiannaki, 2021).

Layanan angkutan umum dapat dibedakan berdasarkan jalur yang digunakan sebagai berikut:

- a) Kendaraan melalui jalan raya: bus, troli, layanan paratransit, layanan vanpool;
- b) Kendaraan melalui rel: kereta berat, kereta komuter, trem, bawah tanah;
- c) Kendaraan yang menggunakan “jalur tetap lainnya”: kereta gantung, monorel, transit jalur pemandu otomatis;
- d) Kendaraan yang melewati air: feri khusus penumpang dan kendaraan, taksi air.
- e) Kendaraan melalui udara: Pesawat dan helicopter.²¹

Semua kendaraan ini berbeda satu sama lain dalam karakteristik operasional. Dengan demikian, mayoritas sistem angkutan umum menggunakan lebih dari satu jenis kendaraan, yang membantu mencapai efek sinergi. Karakteristik kendaraan angkutan umum juga ditentukan oleh jarak tempuh yang harus ditempuh. Karena jarak atau wilayah operasionalnya, angkutan umum dapat dibedakan menjadi angkutan lokal (perkotaan), regional, nasional dan internasional.²²

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, dimana pendekatan deskriptif kualitatif pada penelitian ini mengungkapkan permasalahan dengan menggambarkan dan menginterpretasikan lebih jelas mengenai implementasi kebijakan retribusi

²⁰ Gultom, Rifyal Zuhdi, dan Annisa Qadarusman Tini. "Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6.2 (2020): 203-211.

²¹ Hörcher, Daniel, Ramandeep Singh, dan Daniel J. Graham. "Social Distancing in Public Transport: Mobilising New Technologies for Demand Management under the Covid-19 crisis." *Transportation* 49.2 (2022): 735-764.

²² Vidal, Thibaut, Gilbert Laporte, dan Piotr Matl. "A Concise Guide to Existing and Emerging Vehicle Routing Problem Variants." *European Journal of Operational Research* 286.2 (2020): 401-416.

jasa usaha angkutan umum di Terminal Tipe-C Guntur Garut. Pada penelitian ini sumber data diperoleh melalui data primer dan juga data sekunder. Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan juga studi dokumentasi. Pada penelitian ini informan dibagi menjadi 2 (dua), yang terdiri dari informan kunci (key informan) yakni kepala UPTD Perhubungan Wilayah I dan informan tambahan yaitu petugas penagih retribusi, serta pengemudi angkutan umum. Peneliti menggunakan teknik purposive atau dipilih secara sengaja didalam memilih informan guna mengumpulkan data yang akurat. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yang dilakukan dalam tiga tahapan yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Dalam menguji keabsahan data pada penelitian ini peneliti memilih sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini, yakni dengan meningkatkan ketekunan dan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UPTD Perhubungan Wilayah I merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Perhubungan yang menjalankan tugas-tugas dinas. Adapun jangkauan wilayah kerja UPTD Perhubungan Wilayah I meliputi 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Karangpawitan, Banyuresmi, Leles, dan Kadungora. Adapun terkait dengan infrastruktur yang merupakan fasilitas umum yang menjadi tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas UPTD Perhubungan Wilayah I ialah Terminal Tipe C Guntur Garut, dimana pengelolaannya berkaitan langsung dengan pelayanan pada masyarakat khususnya dalam bidang angkutan atau transportasi. Berkenaan dengan tugas lain yang dilaksanakan oleh UPTD Perhubungan Wilayah I terkait dengan Pendapatan Asli Daerah salah satunya ialah Retribusi Terminal atau lebih khususnya retribusi angkutan umum.

Peneliti telah melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh data-data dan juga informasi yang diperlukan dalam proses penyelesaian penelitian baik melalui observasi, wawancara maupun studi dokumentasi. Setelah melakukan reduksi data, peneliti akan memaparkan hasil tersebut dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan publik yang digagas oleh Edward III. Edwar III mengajukan empat dimensi yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan juga struktur birokrasi.

A. Komunikasi

Beberapa instansi/organisasi pelaksana terlibat dalam proses implementasi kebijakan retribusi jasa usaha angkutan umum. Akibatnya, variabel komunikasi dan koordinasi harus dipantau secara hati-hati. Komunikasi, dalam ungkapan Edwards, dipandang sebagai instrumen

kebijakan yang bertindak untuk menyampaikan instruksi dan arahan dari pembuat kebijakan kepada lembaga yang bertugas melaksanakannya. Komunikasi diyakini mampu menciptakan atau meningkatkan kepatuhan pelaksana terhadap peraturan formal dan arahan dari pembuat kebijakan.

Jika tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran kemungkinan besar akan keberatan. Komunikasi yang baik dibutuhkan guna meningkatkan koordinasi, berbagi informasi baik secara intern ataupun ekstern, serta menjadi pemuas bagi kebutuhan sosial. Bagaimanapun masalah koordinasi, informasi, sosialisasi, dan juga persuasi jangan sampai terabaikan dari rangkaian pelaksanaan kebijakan. Terdapat tiga indikator dalam komunikasi implementasi kebijakan retribusi jasa usaha angkutan umum yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi.

Proses transfer informasi yang dimaksud adalah bagaimana menyampaikan informasi dari pembuat kebijakan kepada pihak pelaksana. Hal ini penting karena distribusi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik. Miskomunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksanaannya sering terjadi dalam distribusi komunikasi.²³

Jika kebijakan dijalankan sesuai keinginan, petunjuk implementasi tidak hanya harus diterima oleh pelaksana kebijakan, tetapi juga harus dikomunikasikan dengan jelas. Dengan informasi yang jelas akan mendukung pihak mana pun dan menghilangkan kesalahpahaman yang mungkin berdampak pada kesimpulan kebijakan.

Kemudian, agar implementasi kebijakan menjadi efektif, perintah implementasi harus konsisten dan eksplisit. Meskipun perintah yang diberikan kepada pelaksana kebijakan sudah jelas, namun jika perintah tersebut bertentangan, maka akan sulit bagi pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugasnya secara efisien.

Dalam implementasi kebijakan di terminal-c Guntur Garut, transmisi atau penyampaian kebijakan ini hanya rutin disampaikan di lingkungan internal saja dan masih minim dilakukan kepada para subjek atau sasaran dari kebijakan tersebut, meski secara tidak langsung kebijakan tersebut sudah ditransmisi kan melalui STRD atau surat tagihan retribusi daerah saja. Penyampaian secara langsung dirasa sangat penting untuk dilakukan agar subjek kebijakan mengetahui substansi dari kebijakan tersebut. Namun pada kenyataannya masih minim dilakukan, dimana hanya pernah diadakan sosialisasi 1 kali yakni pada tahun 2018.

Komunikasi mengenai kebijakan retribusi jasa usaha angkutan umum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Garut baik itu oleh UPTD Perhubungan Wilayah I selaku pengelola dan penanggung jawab dari Terminal Tipe-C Guntur Garut dan juga bidang lain yang

²³ Fong, Simon James, dkk. "Composite Monte Carlo Decision Making Under High Uncertainty of Novel Coronavirus Epidemic using Hybridized Deep Learning and Fuzzy Rule Induction." *Applied Soft Computing* 93 (2020): 106282.

terkait sudah jelas dan konsisten, sehingga para pelaksana tidak hanya sebatas tahu tarif pungutan retribusi saja.

B. Sumberdaya

Kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Setiap tingkat pelaksanaan membutuhkan penggunaan sumber daya manusia berkualitas tinggi sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh kebijakan yang diputuskan secara politis.²⁴

Tanpa sumber daya, kebijakan yang hanya akan menjadi tulisan yang berada di atas kertas saja; mereka tidak diimplementasikan untuk memberikan solusi atas masalah masyarakat saat ini atau upaya untuk memberikan layanan masyarakat. Menurut M.A Wahyudi dan Tjijtjik Rahayu, salah satu variabel yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang efektif dan efisien adalah sumber daya. Selain itu, sumber daya memainkan peran penting dalam rotasi organisasi. Implementasi membutuhkan penggunaan sumber daya manusia dan non-manusia. Sumberdaya diperlukan sebagai pendukung dalam menjalankan kebijakan, sumberdaya kebijakan disini terbagi menjadi tiga, yaitu sumberdaya staf, fasilitas, dan informasi.

Staf adalah sumber daya yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan. Salah satu kegagalan paling umum dalam implementasi kebijakan adalah kurangnya karyawan yang cukup, memadai, atau kompeten di bidangnya. Dalam hal mengumpulkan tarif angkutan umum, diperlukan staf yang memadai dengan keahlian yang diperlukan.

Fasilitas fisik juga dapat menjadi sumber daya yang berharga dalam proses implementasi. Seorang pelaksana mungkin memiliki karyawan yang tepat, memahami apa yang harus dilakukan, dan memiliki kekuatan untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa gedung sebagai kantor untuk koordinasi, peralatan, dan perlengkapan, implementasi yang direncanakan tidak mungkin berhasil.

Eksekusi kebijakan sangat bergantung pada informasi, dan ketersediaan informasi yang memadai sangat bermanfaat. Dalam situasi ini, informasi mengacu pada bagaimana mengadopsi atau mengelola suatu kebijakan. Dari tujuan dan topik biaya, hingga tarif biaya, hingga pelaksanaan dan kepatuhan staf dalam menjalankan tugasnya masing-masing, informasi yang diterima oleh pelaksana mengenai pelaksanaan suatu program harus akurat.

Dalam implementasi kebijakan retribusi angkutan umum, sumberdaya staf yang ada dengan jumlah 88 sudah terbilang lebih dari memadai, namun kompetensinya masih tergolong rendah dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi jasa usaha angkutan umum ini.

²⁴ Mohamed, Btool H., dkk. "Strategizing Human Development for a Country in Transition from a Resource-Based to a Knowledge-Based Economy." *Sustainability* 13.24 (2021): 13750.

Berbagai fasilitas didalam pelaksanaan kebijakan pun sebenarnya kelengkapannya sudah cukup namun dapat diketahui kondisi fasilitas yang ada terlihat jelas tidak terawat dan sangat memprihatinkan. Adapun terkait informasi, pada dasarnya sudah adanya informasi tertulis yang berasal dari pemerintah mengenai kebijakan retribusi jasa usaha angkutan umum.

C. Disposisi/Sikap

Sifat dan karakter pelaksana seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis disebut sebagai disposisi. Sikap pelaksana merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan. Jika pelaksana setuju dengan isi kebijakan, mereka dengan senang hati akan melaksanakannya; Namun, jika pendapat mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, proses implementasi akan menemui kesulitan.²⁵

Sikap pelaksana kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan bukanlah hasil perumusan masyarakat lokal yang sangat paham akan tantangan dan permasalahan yang mereka alami. Namun, kebijakan publik biasanya bersifat top-down, yang berarti bahwa pembuat keputusan mungkin tidak menyadari, atau tidak mampu menyentuh, kebutuhan, keinginan, atau masalah yang harus ditangani.

Disposisi dibagi menjadi dua bagian: komitmen dari aparat pelaksana dan kognisi. Komitmen adalah kesepakatan (persekutuan) untuk melakukan sesuatu. Komitmen aparatur pelaksana merupakan aspek kunci dalam implementasi kebijakan; dengan demikian, komitmen harus didukung oleh berbagai faktor dari aparat pelaksana. Faktor pertama yang mempengaruhi komitmen aparatur pelaksana adalah komitmen organisasional, karena kinerja pelaksana kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi. Sedangkan kognisi adalah keyakinan seseorang terhadap segala sesuatu yang diperoleh melalui proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Prosesnya melibatkan pengumpulan dan manipulasi pengetahuan melalui tindakan mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, dan membayangkan.

Aspek-aspek yang menjadi perhatian terkait disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari pengangkatan birokrasi dan insentif. Manipulasi insentif merupakan upaya yang telah dilakukan oleh instansi terkait (Dinas Perhubungan) untuk menjadi faktor pendorong serta mempengaruhi disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan.

²⁵ Wijaya, Andy Fefta, dkk. "The Implementation of Street Vendor Relocation Policy in the Pro-Environmental Era in Mojokerto City Square." *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning* 2.2 (2021): 145-159.

D. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi terkait dengan rentang kendali manajemen dan proses koordinasi dalam pelaksanaan operasi di dalam perusahaan, yang dapat berdampak pada efektifitas pencapaian tujuan organisasi. Karena banyaknya desk post dan seksi yang harus dilalui, struktur yang terlalu besar dengan banyak hirarki menjadi salah satu penyebab lambannya proses pelaksanaan tugas dalam organisasi. Di sisi lain, struktur sederhana memberikan eksekusi kerja yang lebih cepat.

Hanya saja, struktur sederhana dengan beban kerja yang besar memungkinkan tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaan. Jika hal-hal seperti itu tidak terkendali, akan berdampak pada penumpukan tenaga kerja, dan pekerjaan sulit dikendalikan. Akibatnya, setiap bisnis terus mencari atau berusaha mengembangkan struktur yang ideal untuk memastikan terciptanya struktur sederhana dengan beban tugas yang proporsional.

Ada dua bentuk struktur birokrasi dalam pelaksanaannya: kewenangan dan standar operasional prosedur atau SOP. Secara umum, otoritas formal diperlukan agar kebijakan dapat dijalankan. Kewenangan atau keabsahan pelaksana dalam menjalankan kebijakan tertentu disebut dengan kewenangan. Ketika tidak ada kewenangan, kekuatan pelaksana kebijakan di mata publik tidak terlegitimasi, dan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Agar pelaksanaan tugas berjalan dengan sukses, juga harus ada pembagian tugas yang baik agar pelaksanaan kumpulan dapat berjalan dengan efektif dan lancar. Prosedur operasi standar (SOP) kemudian menjadi metode atau alur kerja. Cara atau alur kerja para pelaksana yang menjalankan operasional sehari-hari sesuai dengan kriteria yang ditentukan menjadi acuan penulis dalam penelitian ini.

Dalam implemetasi retribusi jasa usaha angkutan umum, SOP yang ada di Terminal Tipe-C Guntur Garut dilaksanakan dengan sederhana sehingga menimbulkan fleksibilitas dalam penerapannya. Kemudian kewenangan Dinas Perhubungan khususnya yang bersangkutan dengan kebijakan retribusi jasa usaha angkutan umum ini dapat dikatakan kabur. Minimnya tindakan-tindakan yang dilakukan guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan itu menjadi hal yang cukup jelas bahwa kewenangan yang ada masih terbatas

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan retribusi jasa usaha angkutan umum di Terminal Tipe-C Guntur Garut berdasarkan model implementasi Edward III, diketahui bahwa komunikasi dan sumberdaya menjadi faktor yang berpengaruh dalam menghambat implementasi kebijakan retribusi jasa usaha angkutan umum ini. Kurangnya pemanfaatan media komunikasi, serta komunikasi secara langsung yang tidak dilakukan secara intensif kepada sasaran kebijakan menyebabkan tidak diketahuinya antara apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan demikian, dampak dari komunikasi dalam implementasi kebijakan ini tidak hanya langsung, namun juga dirasakan

kaitannya dengan capaian pendapatan retribusi yang tidak memenuhi target. Sumberdaya juga secara tidak langsung mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi jasa usaha kurangnya kompetensi yang dimiliki sumberdaya manusia bisa merintang transmissi kebijakan. Sumberdaya kewenangan yang tersedia terbatas, hal ini menyulitkan Dinas Perhubungan ataupun UPTD Perhubungan untuk bertindak. Kemudian sumberdaya fasilitas yang tersedia di Terminal Tipe-C Guntur Garut tidak terawat dengan baik yang membuat fasilitas yang ada menjadi terbengkalai dan pelayanan pun menjadi buruk.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalimunthe, Yowanda Pasyah, dan Susilawati Susilawati. "Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Medan Menggunakan Teori Edward III." *FLORONA: Jurnal Ilmiah Kesehatan* 1.2 (2022): 59-64.
- Feldman, Maryann, Frederick Guy, dan Simona Iammarino. "Regional Income Disparities, Monopoly and Finance." *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society* 14.1 (2021): 25-49.
- Fong, Simon James, dkk. "Composite Monte Carlo Decision Making Under High Uncertainty of Novel Coronavirus Epidemic using Hybridized Deep Learning and Fuzzy Rule Induction." *Applied Soft Computing* 93 (2020): 106282.
- Gultom, Rifyal Zuhdi, dan Annisa Qadarusman Tini. "Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6.2 (2020): 203-211.
- Hörcher, Daniel, Ramandeep Singh, dan Daniel J. Graham. "Social Distancing in Public Transport: Mobilising New Technologies for Demand Management under the Covid-19 crisis." *Transportation* 49.2 (2022): 735-764.
- Kristiana, T., dan R. I. Poetri. "Implementation of Local Tax Service Policies at the Regional Tax and Retribution Management Agency Office of Palangka Raya City." *Jurnal Terapan Manajemen Dan Bisnis* 5.2 (2019): 61-69.
- Li, Zao, dkk. "Analysis of the Elderly's Preferences for Choosing Medical Service Facilities from the Perspective of Accessibility: A Case Study of Tertiary General Hospitals in Hefei, China." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19.15 (2022): 9432.
- Lubis, Rahmat, dan Utary Maharany Barus. "BPHTB Management in Increasing Genuine Income Deli Serdang District." *East Asian Journal of Multidisciplinary Research* 1.10 (2022): 2291-2300.
- Mańkowska, Marta, dkk. "Seaports during the COVID-19 Pandemic: The Terminal Operators' Tactical Responses to Disruptions in Maritime Supply Chains." *Energies* 14.14 (2021): 4339.
- Miraj, Perdana, dkk. "Research Trend of Dry Port Studies: A Two-Decade Systematic Review." *Maritime Policy & Management* 48.4 (2021): 563-582.
- Mohamed, Btool H., dkk. "Strategizing Human Development for a Country in Transition from a Resource-Based to a Knowledge-Based Economy." *Sustainability* 13.24 (2021): 13750.
- Mubarok, Syahrul, dkk. "Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee s Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework." *JPAS (Journal of Public Administration Studies)* 5.1 (2020): 33-38.

- Erna Rustiana, Ieke Sartika Iriany, Ardi Pardiansyah Nugraha: Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Angkutan Umum di Terminal Tipe-C Guntur Garut
- Nurfatriani, Fitri, dkk. "Oil Palm Economic Benefit Distribution to Regions for Environmental Sustainability: Indonesia's Revenue-Sharing Scheme." *Land* 11.9 (2022): 1452.
- Nurlailah, Nurlailah. "Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kab. Ogan Komering Ulu." *Jurnal dinamika* 1.2 (2021): 59-68.
- Pozoukidou, Georgia, dan Zoi Chatziyiannaki. "15-Minute City: Decomposing the New Urban Planning Eutopia." *Sustainability* 13.2 (2021): 928.
- Ramadhan, Puja Rizqy. "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi* 5.1 (2019): 81-87.
- Roemer, Kelli F., dan Julia H. Haggerty. "The Energy Transition as Fiscal Rupture: Public Services and Resilience Pathways in a Coal Company Town." *Energy Research & Social Science* 91 (2022): 102752.
- Roestamy, Martin, dkk. "A Review of the Reliability of Land Bank Institution in Indonesia for Effective Land Management of Public Interest." *Land Use Policy* 120 (2022): 106275.
- Sari, Diana, dan Mulyono Yalia. "Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi untuk Pengembangan Kepariwisata di Kota Cirebon." *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)* 20.1 (2019): 13-28.
- Tevapitak, K., dan AHJ Bert Helmsing. "The Interaction between Local Governments and Stakeholders in Environmental Management: The Case of Water Pollution by SMEs in Thailand." *Journal of Environmental Management* 247 (2019): 840-848.
- Vidal, Thibaut, Gilbert Laporte, dan Piotr Matl. "A Concise Guide to Existing and Emerging Vehicle Routing Problem Variants." *European Journal of Operational Research* 286.2 (2020): 401-416.
- Watopa, Elsy Henni, Alfitri Alfitri, dan Andrias Lionardo. "Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kampung Tobati di Kota Jayapura Provinsi Papua." *SEIKO: Journal of Management & Business* 4.3 (2022): 32-41.
- Widodo, Hananto. "Penegakan Hukum terhadap Pedagang Asongan Berkaitan dengan Larangan Menjual Barang di Dalam Angkutan Umum Jenis Bus di Terminal Tambak Osowilangun Surabaya." *Novum: Jurnal Hukum* 7.4 (2020).
- Wijaya, Andy Fefta, dkk. "The Implementation of Street Vendor Relocation Policy in the Pro-Environmental Era in Mojokerto City Square." *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning* 2.2 (2021): 145-159.
- Zhang, Junyi. "Transport Policymaking that Accounts for COVID-19 and Future Public Health Threats: A PASS Approach." *Transport policy* 99 (2020): 405-418.